

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Andri Kristanto, 2008:1). Sistem dirancang untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Gaji dan upah adalah komponen biaya yang secara rutin terjadi dalam penyelenggaraan perusahaan dan sangat penting, karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa, gaji dan upah merupakan biaya yang paling dominan. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya maka diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah.

Setiap instansi pemerintahan selalu membutuhkan beberapa tenaga manusia yaitu karyawan untuk membantu memudahkan jalannya pekerjaan yang dijalani oleh badan usaha, perusahaan maupun instansi. Karyawan pada suatu instansi pemerintahan disebut PNS (Pegawai Negeri Sipil). Menurut UU No 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian, PNS atau Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang -undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah instansi. Sama halnya dengan karyawan di perusahaan untuk mencapai target perusahaan dan PNS untuk menjalankan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan baik dibutuhkan adanya balas

jasa atau pembayaran gaji yang sesuai. hal ini juga bisa menjadi salah satu usaha untuk pemicu semangat kinerja karyawan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah di bidang pendapatan , keuangan dan aset daerah. Memiliki tugas pokok sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa subbagian dengan tugas masing – masing. Salah satunya sub bagian yang berperan penting terhadap sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil yaitu subbagian Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan, Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur.

Badan Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati juga memberikan pelayanan kepada pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Kabupaten Pati, di berbagai instansi – instansi termasuk didalam adalah pelayanan penggajian yang didistribusikan setiap bulannya. Besarnya gaji para pegawai negeri sipil ditentukan oleh berbagai unsur, misalnya golongan dan jabatan, lamanya bekerja, serta tunjangan – tunjangan yang ada. Sistem penggajian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diatur dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pendistribusian gaji berjalan dengan baik dan dapat menghindari tindakan manipulasi dari pihak pihak tidak terkait yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat betapa pentingnya system penggajian bagi beropersianya suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan, Maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul : “SISTEM PENCAIRAN DANA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan serta mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan system penggajian pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka permasalahan dibatasi pada :

1. Pengertian system penggajian bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dokumen yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam system penggajian pegawai negeri sipil.
3. Catatan – catatan yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam system Penggajian pegawai negeri sipil.
4. Fungsi yang terkait dana system penggajian pegawai negeri sipil.
5. Jaringan Prosedur yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membetuk system penggajian pegawai negeri sipil.
6. Bagan Alir system penggajian pegawai negeri sipil yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan adanya penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk media pengaplikasian teori – teori yang sudah penulis terima selama menempuh pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro jurusan Diploma III Akuntansi khususnya bidang yang berhubungan dengan system penggajian.
2. Untuk mengetahui penerapan prosedur system penggajian pegawai negeri sipil yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

## **1.4 Metode Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Jenis Data**

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis di lapangan secara langsung, baik melalui wawancara maupun hasil pengukuran langsung lainnya. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara pada bagian – bagian yang berkaitan dengan system penggajian pegawai negeri sipil yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain. Dalam penulisan Tugas Akhir ini data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku – buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas

### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati serta ditempatkan di subbagian perbendaharaan guna memaksimalkan dalam pengamatan terhadap jalannya system penggajian pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

#### 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara (Nazir, 1988). Dengan data yang ada penulis mengembangkan menjadi beberapa pertanyaan lagi dnegan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan terinci dari pihak pihak yang berkaitan dengan system penggajian pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pati.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penulisan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI**

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya, tata kerja, struktur organisasi, tugas pokok subbagian serta fungsinya serta hal hal lain yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan pembahasan tentang system penggajian pegawai negeri sipil, komponen gaji, , dokumen – dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta pelaksanaan prosedur system penggajian

### **BAB IV PENUTUP**

Dibagian penutup ini penulis menguraikan ringkasan atas bab – bab sebelumnya khususnya bab III